

# LAPORAN KEUANGAN

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018  
T.A 2021

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNGPINANG**

*Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021*

*(Audited)*



NOMOR : 1974/KU.120/L.27.C/05/22

TANGGAL : 18 Mei 2022

**JL. RAWASARI NO. 22 A - TANJUNGPINANG  
KEPULAUAN RIAU - 29123**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Semester II T.A 2021 (*audited*) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tanjungpinang, 18 Mei 2022  
Kepala Balai,

Raden Nurcahyo Nugroho  
NIP.198012132005011002

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....</b>	<b>5</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>6</b>
<b>I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>8</b>
<b>II. NERACA .....</b>	<b>9</b>
<b>III. LAPORAN OPERASIONAL.....</b>	<b>10</b>
<b>IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....</b>	<b>11</b>
<b>V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>12</b>
<b>A. PENJELASAN UMUM.....</b>	<b>12</b>
<b>A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang... 12</b>	<b>12</b>
<b>A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....</b>	<b>14</b>
<b>A.3. Basis Akuntansi .....</b>	<b>15</b>
<b>A.4. Dasar Pengukuran .....</b>	<b>15</b>
<b>A.5. Kebijakan Akuntansi.....</b>	<b>15</b>
<b>B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....</b>	<b>21</b>
<b>B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK .....</b>	<b>21</b>
<b>B.2 BELANJA .....</b>	<b>23</b>
<b>B.3. BELANJA PEGAWAI.....</b>	<b>23</b>
<b>B.4. BELANJA BARANG .....</b>	<b>25</b>
<b>B.5. BELANJA MODAL .....</b>	<b>26</b>
<b>B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN .....</b>	<b>26</b>
<b>B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN .....</b>	<b>27</b>
<b>C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA .....</b>	<b>29</b>
<b>C.1. ASET LANCAR .....</b>	<b>29</b>
<b>C.2 ASET TETAP .....</b>	<b>30</b>
<b>C.3 ASET LAINNYA.....</b>	<b>32</b>
<b>C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK.....</b>	<b>33</b>
<b>C.5 EKUITAS.....</b>	<b>34</b>
<b>D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL .....</b>	<b>34</b>
<b>D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya .....</b>	<b>34</b>
<b>D.2 Beban Pegawai .....</b>	<b>34</b>
<b>D.3 Beban Persediaan .....</b>	<b>35</b>
<b>D.4 Beban Barang Dan Jasa.....</b>	<b>36</b>
<b>D.5 Beban Pemeliharaan .....</b>	<b>36</b>
<b>D.6 Beban Perjalanan Dinas .....</b>	<b>37</b>

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	40
<b>E.1 Ekuitas Awal</b> .....	40
<b>E.2. Surplus/Defisit-LO</b> .....	40
<b>E.3. Koreksi Yang Membah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar</b> .....	40
<b>E.4. Transaksi Antar Entitas</b> .....	40
E.5. Ekuitas Akhir.....	41
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA .....	42

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNGPINANG**  
**JL. RAWASARI NO.22 A - TANJUNGPINANG**  
**TELEPON 0771 319737, e-mail: bkp2tpi@yahoo.com**

---

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Semester II T.A 2021 (*audited*) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 18 Mei 2022  
Kepala Balai,

Raden Nurcahyo Nugroho  
NIP. 198012132005011002

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.641.312.902,00 atau mencapai 114,10% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.315.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp12.702.867.199,00 atau mencapai 99,94% dari alokasi anggaran sebesar Rp12.710.632.000,00

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp15.727.075.933,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp350.124.599,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp15.376.951.334,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp32.317.320,00 dan Rp15.694.758.613,00.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.639.152.902,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp12.189.236.144,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp.-9.550.083.242,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp2.147.124,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-9.547.936.118,00.

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp15.113.633.934,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-9.547.936.118,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.129.060.797,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp15.694.758.613,00.

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNGPINANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021			31 Desember 2020
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
▪ Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	2.315.000.000,00	2.641.312.902,00	114,10	2.816.479.631,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		2.315.000.000,00	2.641.312.902,00	114,10	2.816.479.631,00
BELANJA					
▪ Belanja Pegawai	B.3.	4.321.168.000,00	4.316.149.733,00	99,88	4.459.203.241,00
▪ Belanja Barang	B.4.	7.016.943.000,00	7.015.789.430,00	99,98	5.509.987.834,00
▪ Belanja Modal	B.5.	1.372.521.000,00	1.370.928.036,00	99,88	2.630.635.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>		12.710.632.000,00	12.702.867.199,00	99,94	12.599.826.075,00



## II. NERACA

### BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNGPINANG NERACA PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
▪ Persediaan	C.1.1.	350.124.599,00	278.920.307,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>350.124.599,00</b>	<b>278.920.307,00</b>
<b>Aset Tetap</b>			
▪ Tanah	C.2.1.	5.637.084.000,00	5.637.084.000,00
▪ Peralatan dan Mesin	C.2.2.	9.347.286.901,00	9.038.007.546,00
▪ Gedung dan Bangunan	C.2.3.	7.391.928.358,00	6.776.686.558,00
▪ Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	394.537.571,00	394.537.571,00
▪ Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.5.	266.872.881,00	77.376.000,00
▪ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-7.660.758.377,00	-7.050.771.891,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>15.376.951.334,00</b>	<b>14.872.919.784,00</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
▪ Aset Lain-lain	C.3.1.	302.810.000,00	0,00
▪ Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	-302.810.000,00	0,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>15.727.075.933,00</b>	<b>15.151.840.091,00</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
▪ Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	32.317.320,00	38.206.157,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>32.317.320,00</b>	<b>38.206.157,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>32.317.320,00</b>	<b>38.206.157,00</b>
<b>Ekuitas</b>			
▪ Ekuitas	C.5.	15.694.758.613,00	15.113.633.934,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>15.694.758.613,00</b>	<b>15.113.633.934,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>15.727.075.933,00</b>	<b>15.151.840.091,00</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNGPINANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
▪ Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	2.639.152.902,00	2.790.009.180,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.639.152.902,00</b>	<b>2.790.009.180,00</b>
<b>BEBAN</b>			
▪ Beban Pegawai	D.2.	4.309.411.824,00	4.465.145.171,00
▪ Beban Persediaan	D.3.	402.269.332,00	403.683.769,00
▪ Beban Barang dan Jasa	D.4.	3.200.946.621,00	2.664.696.928,00
▪ Beban Pemeliharaan	D.5.	1.064.499.018,00	967.085.000,00
▪ Beban Perjalanan Dinas	D.6.	2.299.312.863,00	1.463.819.326,00
▪ Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	912.796.486,00	866.790.308,00
▪ Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	0,00	0,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>12.189.236.144,00</b>	<b>10.831.220.502,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>-9.550.083.242,00</b>	<b>-8.041.211.322,00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
▪ Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0,00	26.470.177,00
▪ Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0,00	140.487.446,00
▪ Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	2.160.000,00	3.420.924,00
▪ Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	12.876,00	1.620.124,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>2.147.124,00</b>	<b>-112.216.469,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>-9.547.936.118,00</b>	<b>-8.153.427.791,00</b>

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNGPINANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1.	15.113.633.934,00	13.012.014.600,00
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2.	-9.547.936.118,00	-8.153.427.791,00
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3.	0,00	154.747.002,00
▪ Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	0,00	-23.573.000,00
▪ Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	0,00	178.320.002,00
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.4.	10.129.060.797,00	10.100.300.123,00
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	E.5.	581.124.679,00	2.101.619.334,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6.</b>	<b>15.694.758.613,00</b>	<b>15.113.633.934,00</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kualitas Perkarantinaan Pertanian Indonesia khususnya di Wilayah Kepulauan Riau. Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang memiliki tujuan memberikan pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif. Melalui peranan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang diharapkan pelaksanaan tindak karantina dipintu-pintu pemasukan/pengeluaran dapat terlaksana dengan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung pelestarian sumber daya hayati dan keamanan pangan khususnya di Wilayah Kepulauan Riau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian menyatakan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

##### A.1.1 Kedudukan

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian di Lingkungan Badan Karantina Pertanian, yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala.

##### A.1.2 Tugas

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati.

##### A.1.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, evaluasi dan laporan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- 3) Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- 4) Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- 5) Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- 6) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- 7) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- 8) Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;

- 9) Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;
- 10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam tataran praktisnya, Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang membuat rencana strategis program yang diyakini mampu mendorong terciptanya visi dan misi dalam rangka menunjang tujuan pembangunan pertanian. Program strategis tersebut meliputi :

- Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, serta
- Program Dukungan Manajemen

Tujuan program tersebut adalah terlaksana kegiatan tindak perkarantina di Wilayah Kepulauan Riau khususnya yang menjadi wilayah kerja dari Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melindungi sumber daya hayati dan keamanan pangan.

Berikut Capaian Output selama Tahun Anggaran 2021 yang telah dicapai oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang :

**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (HA.4586)**

Klasifikasi Rincian Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	% Penyerapan	TVRO	RVRO	PCRO (%)
Sertifikasi Produk (PDC)	Setifikasi Karantina Pertanian (500)	2.513.255.000	2.512.573.995	99,97	8.160 Sertifikat	21.018 Sertifikat	257,57

**Program Dukungan Manajemen (WA.1821)**

Klasifikasi Rincian Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	% Realisasi	TVRO	RVRO	PCRO (%)
Layanan Perkantoran (EAA)	Layanan Perkantoran UPT Operasional (120)	7.959.334.000	7.954.217.477	99,99	1 Layanan	1 layanan	100
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (EAB)	Layanan Perencanaan UPT Operasional (231)	15.497.000	15.487.300	99,94	1 dokumen	1 dokumen	100
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (EAB)	Layanan Perbendaharaan Internal UPT Operasional (313)	57.716.000	57.620.500	99,83	1 dokumen	1 dokumen	100
Layanan Perencanaan	Layanan Pengelolaan	41.452.000	41.372.400	99,81	1 dokumen	1 dokumen	100

an dan Penganggaran Internal (EAB)	Barang Milik Negara UPT Operasional						
Layanan Umum (EAC)	Layanan Kearsipan dan Ketatausahaan UPT Operasional (513)	485.018.000	484.923.489	99,98	1 Layanan	1 layanan	100
Layanan Sarana Internal (EAD)	Layanan Sarana Internal UPT Operasional (631)	566.400.000	566.189.355	99,96	22 unit	22 unit	100
Layanan Prasarana Internal (EAE)	Layanan Prasarana Internal UPT Operasional (731)	806.121.000	804.738.681	99,83	1 unit	1 unit	100
Layanan SDM (EAF)	Layanan Manajemen SDM UPT Operasional (533)	195.232.000	195.165.100	99,97	54 orang	54 orang	100
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (EAH)	Layanan Reformasi Birokrasi UPT Operasional (534)	15.220.000	15.213.500	99,96	1 layanan	1 layanan	100
Layanan Kehumasan dan Protokoler (EAI)	Layanan Humas dan Informasi UPT Operasional (741)	18.143.000	18.142.400	100	1 layanan	1 layanan	100
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi UPT Operasional	37.244.000	37.223.002	99,94	1 layanan	1 layanan	100

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI

dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### **A.3. Basis Akuntansi**

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

### (1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



## (5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek
 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang
 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### (7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	2.065.000.000,00	2.065.000.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.315.000.000,00</b>	<b>2.315.000.000,00</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.553.482.000,00	3.402.040.000,00
Belanja Lembur	926.088.000,00	919.128.000,00
Belanja Barang Operasional	1.833.094.000,00	1.929.196.000,00
Belanja Barang Non Operasional	185.887.000,00	259.146.000,00
Belanja Barang Persediaan	485.000.000,00	451.881.000,00
Belanja Jasa	899.556.000,00	1.011.951.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.015.916.000,00	1.064.546.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.891.550.000,00	2.300.223.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	566.400.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.924.800.000,00	806.121.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>19.715.373.000,00</b>	<b>12.710.632.000,00</b>

### B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.641.312.902,00 atau mencapai 114,10% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.315.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Jasa Lainnya	250.000.000,00	259.950.000,00	103,98
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	2.065.000.000,00	2.379.202.902,00	115,22

Uraian	2021			
	Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Lain-Lain		0,00	2.160.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.315.000.000,00</b>	<b>2.641.312.902,00</b>	<b>114,10</b>

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami penurunan sebesar -6,22% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	26.470.177,00	-100,00
Pendapatan Jasa Lainnya	259.950.000,00	249.600.000,00	4,15
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	2.379.202.902,00	2.540.409.180,00	-6,35
Pendapatan Lain-Lain	2.160.000,00	274,00	788.221,17
<b>Jumlah</b>	<b>2.641.312.902,00</b>	<b>2.816.479.631,00</b>	<b>-6,22</b>

Pada Tahun 2021 terdapat pendapatan lain-lain yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp. 2.160.000,- merupakan pengembalian belanja tunjangan fungsional a.n Ade Putra selama 6 (enam) bulan Maret – Agustus 2021 dikarenakan yang bersangkutan mendapatkan tugas belajar Program Strata-1 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 235/Kpts/SM.220/I/09/19 Tentang Peserta Didik Tinggi Vokasi Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia Tahun Akademik 2019/2020.

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp12.702.867.199,00 atau 99,94% dari anggaran belanja sebesar Rp12.710.632.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

### Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Belanja</b>			
Belanja Pegawai	4.321.168.000,00	4.322.400.133,00	100,03
Belanja Barang	7.016.943.000,00	7.015.789.430,00	99,98
Belanja Modal	1.372.521.000,00	1.370.928.036,00	99,88
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>12.710.632.000,00</b>	<b>12.709.117.599,00</b>	<b>99,99</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>-6.250.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Belanja</b>	<b>12.710.632.000,00</b>	<b>12.702.867.199,00</b>	<b>99,94</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,82% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

- Penurunan pagu belanja modal yang sangat signifikan dibandingkan dengan Tahun 2020 dimana pada Tahun 2020 terdapat pembelian sebidang tanah, sedangkan pada Tahun 2021 belanja modal diperuntukan untuk belanja peralatan dan mesin, serta pembangunan gedung/ bangunan.

### Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Belanja Pegawai	4.316.149.733,00	4.459.203.241,00	-3,21
Belanja Barang	7.015.789.430,00	5.509.987.834,00	27,33
Belanja Modal	1.370.928.036,00	2.630.635.000,00	-47,89
<b>Total Belanja</b>	<b>12.702.867.199,00</b>	<b>12.599.826.075,00</b>	<b>0,82</b>

### B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.316.149.733,00 dan Rp4.459.203.241,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar -3,21% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Perubahan Data Pegawai Sampai Dengan  
Per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Kenaikan Gaji Berkala	35 orang
2	Kenaikan pangkat	5 orang
3	Kenaikan jabatan fungsional & struktural	15 orang
4	Perubahan status (menikah)	2 orang
5	Penambahan anggota keluarga (anak)	1 orang
6	Perubahan tunjangan struktural	0 orang
7	CPNS menjadi PNS	1 orang
8	Pengangkatan struktural	1 orang
9	Mutasi Masuk	1 orang
10.	Kenaikan tunjangan fungsional karena perubahan nomenklatur	9 orang
11	Penurunan tunjangan fungsional karena perubahan nomenklatur	8 orang
12	Penghapusan tunjangan struktural karena perubahan nomenklatur	2 orang
13	Penyelesaian Tugas Belajar (Pengembalian)	1 orang
14	Pengurangan tunjangan anak	1 orang

Perbandingan Belanja Pegawai  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.403.281.133,00	3.461.855.643,00	-1,69
Belanja Lembur	919.119.000,00	999.993.000,00	-8,09
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>4.322.400.133,00</b>	<b>4.461.848.643,00</b>	<b>-3,13</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>-6.250.400,00</b>	<b>-2.645.402,00</b>	<b>136,27</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.316.149.733,00</b>	<b>4.459.203.241,00</b>	<b>-3,21</b>



Sepanjang Tahun 2021 terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp. 6.250.400 yang terdiri dari:

No	Akun	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan gaji PNS	340	Pembayaran kekurangan Gaji Bulan April s/d Juli a.n Hetty E.S dikarenakan kenaikan pangkat
2.	511123	Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS	3.920.060	Pengembalian tunjangan struktural a.n drh. Purwanto selama 8 (delapan) bulan (Januari s.d Agustus) dikarenakan adanya perubahan nomenklatur
3.	511124	Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.760.000	Pengembalian Tunjangan Fungsional PNS a.n - lfron - Umi Hanani, A.Md - M.Fauzi, A.Md - Malik H - Rizki Fadilah, A.Md - Herro P.P, A.Md - Sawin R - Tati Suryani Dikarenakan perubahan nomenklatur Paramedik Veteriner menjadi Paramedik Karantina Hewan dan POPT menjadi Pemeriksa Karantina Tumbuhan
4.	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	570.000	Pengembalian tunjangan umum a.n Liza Hardani, SP selama 3 (tiga) bulan Januari – Maret 2021

### B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.015.789.430,00 dan Rp5.509.987.834,00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 27,33% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

## Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.929.194.895,00	1.736.383.075,00	11,10
Belanja Barang Non Operasional	259.043.100,00	210.775.922,00	22,90
Belanja Barang Persediaan	451.880.000,00	421.249.600,00	7,27
Belanja Jasa	1.011.859.554,00	710.674.911,00	42,38
Belanja Pemeliharaan	1.064.499.018,00	967.085.000,00	10,07
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.299.312.863,00	1.466.129.850,00	56,83
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>7.015.789.430,00</b>	<b>5.512.298.358,00</b>	<b>27,28</b>
<b>Pengembalian Belanja Barang</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.310.524,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>7.015.789.430,00</b>	<b>5.509.987.834,00</b>	<b>27,33</b>

## B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.370.928.036,00 dan Rp2.630.635.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar -47,89% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja modal Tahun 2021 diperuntukan untuk belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal gedung dan bangunan, sedangkan pada Tahun 2020 terdapat belanja modal tanah yang nilainya cukup besar.

## Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah	0,00	1.623.854.000,00	-100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	566.189.355,00	884.755.000,00	-36,01
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	804.738.681,00	77.376.000,00	940,04
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	44.650.000,00	-100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.370.928.036,00</b>	<b>2.630.635.000,00</b>	<b>-47,89</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.370.928.036,00</b>	<b>2.630.635.000,00</b>	<b>-47,89</b>

**B.2.3.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp566.189.355,00 dan Rp884.755.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami penurunan sebesar -36,01% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2021 hanya terdiri dari pembelian peralatan dan mesin kendaraan roda-2, peralatan laboratorium dan teknis lapangan, perangkat komunikasi dan pengolah data serta peralatan fasilitas kantor tidak terdapat pembelian kendaraan roda-4.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	566.189.355,00	884.755.000,00	-36,01
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>566.189.355,00</b>	<b>884.755.000,00</b>	<b>-36,01</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>566.189.355,00</b>	<b>884.755.000,00</b>	<b>-36,01</b>

**B.2.3.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp804.738.681,00 dan Rp77.376.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 940,04% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Adanya pembangunan 3 unit rumah jaga yang berlokasi di Jl. Sultan Mahmud, Tanjungpinang.
2. Pembangunan 2 (dua) unit gedung parkir yang masing-masing berlokasi di Wilayah Kerja Tanjung Uban dan Bandara RHF

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	804.738.681,00	77.376.000,00	940,04
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>804.738.681,00</b>	<b>77.376.000,00</b>	<b>940,04</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>804.738.681,00</b>	<b>77.376.000,00</b>	<b>940,04</b>

**B.2.4. BELANJA PENANGANAN PANDEMI COVID-19**

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar

Tabel Rincian Belanja Untuk Penanganan Pandemi COVID-19  
Tahun 2021

No	Akun	Alokasi Anggaran/ DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	521131	150.283.000	150.282.200	100,00
2	522192	273.855.000	273.824.135	99,99
Total		424.138.000	424.106.335	99,99

Seluruh realisasi belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 telah menggunakan akun khusus COVID-19. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 yaitu antara lain belanja barang operasional dan belanja jasa penanganan pandemi COVID-19 dilingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang.

Tabel Rincian  
Perbandingan Pagu Belanja Penangan an Pandemi Covid  
Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	Akun	Alokasi Anggaran		%
		2021 (Rp)	2020 (Rp)	
1.	521131	150.283.000	60.680.000	147,66
2.	521241	-	78.550.000	-
3.	522192	273.855.000	-	-
4.	524115	-	114.900.00	-

Tabel Rincian  
Perbandingan Realisasi Belanja Penangan an Pandemi Covid  
Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	Akun	Realisasi		%
		2021 (Rp)	2020 (Rp)	
1.	521131	150.282.200	60.680.000	147,66
2.	521241	-	78.128.000	-
3.	522192	273.824.135	-	-
4.	524115	-	114.900.00	-

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. ASET LANCAR

#### C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.350.124.599,00 dan Rp.278.920.307,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut

Perbandingan Persediaan  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	350.124.599,00	278.920.307,00
<b>Jumlah</b>	<b>350.124.599,00</b>	<b>278.920.307,00</b>

Nilai persediaan dapat uraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo awal (audited)	<b>278.920.307,-</b>
<b>Penambahan</b>		
1.	Pembelian	451.880.000,-
2.	Transfer masuk	21.606.500,-
3.	Reklasifikasi masuk	-
4.	Opname fisik	-
5.	Koreksi penyesuaian persediaan	-
6.	Koreksi tambah	-
<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>473.486.500,-</b>
<b>Pengurangan</b>		
1.	Transfer keluar	-
2.	Beban persediaan/ pemakaian	402.269.332,-
3.	Penghapusan/ rusak/usang	12.876,-
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>402.256.456,-</b>
<b>Jumlah Persediaan (saldo per 31 Desember 2021)</b>		<b>350.124.599,-</b>

## C.2 ASET TETAP

### C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.637.084.000,00 dan Rp5.637.084.000,00.

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.347.286.901,00 dan Rp9.038.007.546,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>9.038.007.546,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	566.189.355,00
Transfer Masuk	45.900.000,00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-302.810.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>9.347.286.901,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-6.855.005.140,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>2.492.281.761,00</b>

Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin Rp566.189.355,- berasal dari pembelian:

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Sice	2 unit	41.250.000,-
2	Genset	1 unit	13.519.165,-
3	Genset	1 unit	32.233.190,-
4	Printer	2 unit	7.700.000,-
5	Camera Digital	1 unit	19.030.000,-
6	Dispenser	3 unit	9.900.000,-
7	CCTV	4 unit	108.900.000,-
8	Sepeda Motor	3 unit	96.948.000,-
9	Micro Pippettes	1 unit	4.840.000,-
10	Tabung gas (Harris Small Scale CO2)	1 unit	7.128.000,-
11	Printer	6 Unit	28.380.000,-
12	UPS	24 unit	55.176.000,-
13	Laptop	8 unit	141.185.000,-

Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin Rp 45.900.000,- berasal dari transfer masuk:

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
1	PC Unit Komputer IQ Fast	2 unit	45.900.000,-

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin sebesar Rp.302.810.000,- adalah berupa:

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Mini Bus, Toyota Kijang Super KF38 Short	1	110.342.000,-
2.	Mini Bus, Ford Ranger	1	134.300.000,-
3.	Sepeda Motor, NF 125 D	1	12.864.000,-
4.	Sepeda Motor, Suzuki FH 125 D	1	13.650.000,-
5.	Sepeda Motor, Honda GL 200 R	1	7.809.000,-
6.	Sepeda Motor, Honda FH 125 D	1	13.650.000,-
7.	Sepeda Motor, NF 100	1	10.195.000,-

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.391.928.358,00 dan Rp6.776.686.558,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>6.776.686.558</b>
Mutasi Tambah	
<b>Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP</b>	<b>615.241.800</b>
Saldo per 31 Desember 2021	7.391.928.358
<b>Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021</b>	<b>-715.940.853</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>6.675.987.505</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

- Pembangunan 3 (tiga) unit rumah jaga yang berlokasi di Jl. Sultan Mahmud Tanjungpinang sebesar Rp.498.241.800,-
- Pembangunan gedung parkir di Wilker Tanjung Uban dan Wilker Bandara sebesar Rp. 117.000.000,-

### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp394.537.571,00 dan Rp394.537.571,00

### C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp266.872.881,00 dan Rp77.376.000,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

### C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-7.660.758.377,00 dan Rp-7.050.771.891,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	9.347.286.901,00	-6.855.005.140,00	2.492.281.761,00
2.	Gedung dan Bangunan	7.391.928.358,00	-715.940.853,00	6.675.987.505,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	394.537.571,00	-89.812.384,00	304.725.187,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>17.133.752.830,00</b>	<b>-7.660.758.377,00</b>	<b>9.472.994.453,00</b>

## C.3 ASET LAINNYA

### C.3.1 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp302.810.000,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>0,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	302.810.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>302.810.000,00</b>



Akumulasi Penyusutan s.d 31Desember 2021	-302.810.000,00
<b>Nilai Buku per 31Desember 2021</b>	<b>0,00</b>

Mutasi transaksi penambahan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Mini Bus, Toyota Kijang Super KF38 Short	1	110.342.000,-
2.	Mini Bus, Ford Ranger	1	134.300.000,-
3.	Sepeda Motor, NF 125 D	1	12.864.000,-
4.	Sepeda Motor, Suzuki FH 125 D	1	13.650.000,-
5.	Sepeda Motor, Honda GL 200 R	1	7.809.000,-
6.	Sepeda Motor, Honda FH 125 D	1	13.650.000,-
7.	Sepeda Motor, NF 100	1	10.195.000,-

### C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-302.810.000,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	302.810.000,00	-302.810.000,00	0,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>302.810.000,00</b>	<b>-302.810.000,00</b>	<b>0,00</b>

## C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

### C.4.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp32.317.320,00 dan Rp38.206.157,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	436.421,00	7.174.330,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	31.880.899,00	31.031.827,00
<b>Jumlah</b>	<b>32.317.320,00</b>	<b>38.206.157,00</b>

## C.5 EKUITAS

### C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp15.694.758.613,00 dan Rp15.113.633.934,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.639.152.902,00 dan Rp2.790.009.180,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	2.379.202.902,00	2.540.409.180,00	-6,35
Pendapatan Jasa Lainnya	259.950.000,00	249.600.000,00	4,15
<b>Jumlah</b>	<b>2.639.152.902,00</b>	<b>2.790.009.180,00</b>	<b>-5,41</b>

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.309.411.824,00 dan Rp4.465.145.171,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.207.737.540,00	2.310.248.880,00	-4,44
Beban Pembulatan Gaji PNS	37.984,00	38.124,00	-0,37
Beban Tunj. Anak PNS	49.363.546,00	51.583.016,00	-4,30
Beban Tunj. Beras PNS	149.257.620,00	135.570.240,00	10,10
Beban Tunj. Fungsional PNS	393.266.000,00	302.580.000,00	29,97
Beban Tunj. PPh PNS	5.578.434,00	5.237.825,00	6,50
Beban Tunj. Struktural PNS	16.899.940,00	39.450.000,00	-57,16
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	156.592.760,00	166.631.086,00	-6,02
Beban Tunjangan Umum PNS	9.165.000,00	35.140.000,00	-73,92
Beban Uang Lembur	919.119.000,00	999.993.000,00	-8,09
Beban Uang Makan PNS	402.394.000,00	418.673.000,00	-3,89
<b>Jumlah</b>	<b>4.309.411.824,00</b>	<b>4.465.145.171,00</b>	<b>-3,49</b>

Adapun uraian dari beban belanja pegawai tersebut adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Realisasi belanja pegawai berdasarkan basis kas (netto)	4.316.149.733,-
2	Belanja pegawai yang masih harus dibayar Tahun 2020	<b>(7.174.330,-)</b>
3.	Belanja pegawai yang masih harus dibayar Tahun 2021	436.421,-
	<b>Beban Pegawai Per 31 Desember 2020</b>	<b>4.309.411.824,-</b>

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 402.269.332,00 dan Rp403.683.769,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	402.269.332,00	403.683.769,00	0,35
<b>Jumlah</b>	<b>402.269.332,00</b>	<b>403.683.769,00</b>	<b>0,35</b>

#### D.4 Beban Barang Dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.200.946.621,00 dan Rp2.664.696.928,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Bahan	257.243.100,00	131.447.922,00	95,70
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	78.128.000,00	-100,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	150.282.200,00	60.680.000,00	147,66
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	161.616.000,00	189.791.500,00	-14,85
Beban Honor Output Kegiatan	1.800.000,00	1.200.000,00	50,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	273.824.135,00	0,00	0,00
Beban Jasa Lainnya	126.366.388,00	115.661.000,00	9,26
Beban Jasa Profesi	63.100.000,00	59.500.000,00	6,05
Beban Keperluan Perkantoran	1.405.736.925,00	1.252.418.975,00	12,24
Beban Langganan Air	10.430.250,00	8.172.050,00	27,63
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	115.850.887,00	110.941.501,00	4,43
Beban Langganan Listrik	266.774.993,00	265.214.236,00	0,59
Beban Langganan Telepon	36.557.473,00	37.893.644,00	-3,53
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	209.760.000,00	209.760.000,00	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.799.770,00	23.732.600,00	-92,42
Beban Sewa	119.804.500,00	120.155.500,00	-0,29
<b>Jumlah</b>	<b>3.200.946.621,00</b>	<b>2.664.696.928,00</b>	<b>20,12</b>

## D.5 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.064.499.018,00 dan Rp967.085.000,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

### Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	354.249.000,00	294.385.800,00	20,33
Beban Pemeliharaan Jaringan	50.656.283,00	40.860.350,00	23,97
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	659.593.735,00	631.838.850,00	4,39
<b>Jumlah</b>	<b>1.064.499.018,00</b>	<b>967.085.000,00</b>	<b>10,07</b>

## D.6 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.299.312.863,00 dan Rp1.463.819.326,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

### Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.097.471.996,00	549.296.284,00	99,80
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	114.900.000,00	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	396.600.000,00	290.100.000,00	36,71
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	73.950.675,00	44.750.000,00	65,25
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	476.590.192,00	255.973.042,00	86,19
Beban Perjalanan Tetap	254.700.000,00	208.800.000,00	21,98
<b>Jumlah</b>	<b>2.299.312.863,00</b>	<b>1.463.819.326,00</b>	<b>57,08</b>

## D.7 Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp912.796.486,00 dan Rp866.790.308,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut

### Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	167.652.038,00	135.357.878,00	23,86
Beban Penyusutan Irigasi	3.633.155,00	3.633.155,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	8.242.438,00	7.126.188,00	15,66
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	32.534.000,00	-100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	733.268.855,00	688.139.087,00	6,56
<b>Jumlah</b>	<b>912.796.486,00</b>	<b>866.790.308,00</b>	<b>5,31</b>

## D.8. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

### Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	-140.487.446,00	-100,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	-1.620.124,00	-100,00
Beban Persediaan Rusak/Usang	-12.876,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	3.420.650,00	-100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	24.581.677,00	-100,00
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	1.888.500,00	-100,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2.160.000,00	274,00	788.221,17
<b>Jumlah</b>	<b>2.147.124,00</b>	<b>-112.216.469,00</b>	<b>-101,91</b>

- Beban persediaan rusak/ usang merupakan barang persediaan yang kondisi rusak/ usang senilai Rp. 12.876 dan sudah dilakukan pemusnahan dengan Berita Acara Pemusnahan Nomor: 5151/PL.320/K.27.C/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021.
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp. 2.160.000,- merupakan pengembalian tunjangan fungsional a.n Ade Putra selama 6 (enam) bulan yaitu dari Bulan Maret 2020 – Agustus 2020, dikarenakan yang bersangkutan mendapatkan tugas belajar Program Strata-1 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 235/Kpts/SM.220/I/09/19 Tentang Peserta Didik Tinggi Vokasi Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia Tahun Akademik 2019/2020.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp15.113.633.934,00 dan Rp13.012.014.600,00.

### E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-9.547.936.118,00 dan Rp-8.153.427.791,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp154.747.002,00.

#### E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-23.573.000,00.

#### E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp178.320.002,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp10.129.060.797,00 dan Rp10.100.300.123,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	12.702.867.199,00
Diterima dari Entitas Lain	-2.641.312.902,00
Transfer Masuk	67.506.500,00



Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
<b>Jumlah</b>	<b>10.129.060.797,00</b>

#### E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-2.641.312.902,00 sedangkan DKEL sebesar Rp12.702.867.199,00.

#### E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp67.506.500,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2021.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi	018120199412110000KP	21.606.500,00
2.	Peralatan dan Mesin	018120199412110000KP	45.900.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>67.506.500,00</b>

#### E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp15.694.758.613,00 dan Rp 15.113.633.934,00.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. Pengungkapan Lain-Lain

Pengungkapan penting lain-lain Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun Anggaran T.A 2021 adalah sebagai berikut:

#### A. Revisi DIPA

Selama Tahun 2021 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang melakukan Revisi DIPA sebanyak 5 (lima) kali dengan uraian sebagai berikut:

- Revisi I tertanggal 16 Februari 2021 dengan Nomor Dokumen: SP-DIPA-018.12.2.237725/2021
- Revisi II tertanggal 26 April 2021 dengan Nomor Dokumen: SP-DIPA-018.12.2.237725/2021
- Revisi III tertanggal 06 Agustus 2021 dengan Nomor Dokumen: SP-DIPA-018.12.2.237725/2021
- Revisi IV tertanggal 13 Oktober 2021 dengan Nomor Dokumen: SP-DIPA-018.12.2.237725/2021
- Revisi V tertanggal 29 Desember 2021 dengan Nomor Dokumen: SP-DIPA-018.12.2.237725/2021

#### B. Penghapusan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2021 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang mengusulkan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp. 302.810.000,- dengan rincian barang sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah/buah	Nilai (Rp)
1.	Mini Bus, Toyota Kijang Super KF38 Short	1	110.342.000,-
2.	Mini Bus, Ford Ranger	1	134.300.000,-
3.	Sepeda Motor, NF 125 D	1	12.864.000,-
4.	Sepeda Motor, Suzuki FH 125 D	1	13.650.000,-
5.	Sepeda Motor, Honda GL 200 R	1	7.809.000,-
6.	Sepeda Motor, Honda FH 125 D	1	13.650.000,-
7.	Sepeda Motor, NF 100	1	10.195.000,-
Total			302.810.000,-

Barang-barang tersebut diatas merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang serta dalam proses penghapusan dari BMN sesuai Surat Keputusan Penghentian Barang Milik Negara (BMN) Dari Penggunaannya Nomor: 1674/Kpts/PL.420/K.C.27/5/2021 Tanggal 27 Mei 2021 (terlampir) dan Surat Pernyataan Perubahan Kondisi Nomor: 2149/PL.420/K.27.C/05/2021 tanggal 29 Juni 2021 (terlampir) serta Berita Acara Penelitian/ Penilaian Barang Yang Akan Dihapus Nomor: 1686/PL.420/K.27.C/05/2021 tanggal 28 Mei 2021 (terlampir).

### C. Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara

Per 31 Desember 2021 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang telah melakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) terhadap Barang Milik Negara. Adapun rincian BMN yang sudah dan belum di PSP per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Nilai sudah PSP	Nilai Belum PSP
1	Tanah	5.637.084.000	-
2	Peralatan dan Mesin	7.907.614.546	1.394.179.355
3.	Gedung dan Bangunan	6.715.537.026	702.730.500
4.	Jalan, Irigas dan Jaringan	349.887.571	44.650.000
5.	Aset Yang Tidak Digunakan	302.810.000	-
<b>Sudah PSP</b>		<b>20.912.933.143</b>	<b>2.141.559.855</b>
<b>Total Aset</b>		<b>23.054.492.998</b>	
<b>% Yang Sudah PSP</b>		<b>90,71 %</b>	
<b>% Yang Belum PSP</b>		<b>9,29 %</b>	

Untuk aset peralatan dan mesin sudah dilakukan usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai dengan Surat Kepala Balai Karantina Nomor: 5078/PL.140/K.27.C/12/2021 Tanggal 20 Desember 2021 (terlampir) dan Surat Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: B29295/PL.210/K/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 (terlampir).